

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan adalah Rp 223,846,829,500. Uraian ringkas pagu anggaran dan Realisasi per jenis belanja disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

BELANJA DAERAH	DPPA	REALISASI		SILPA	
	(RP)	(RP)	(%)	(RP)	(%)
BELANJA OPERASI	103.869.222.944	96.633.944.760	93,03	7.235.278.184	6,97
Belanja Pegawai	20.439.215.404	18.128.472.133	88,69	2.310.743.271	11,31
Belanja Barang Dan Jasa	83.430.007.540	78.505.472.627	94,10	4.924.534.913	5,90
BELANJA MODAL	119.977.606.556	119.399.640.049	99,52	577.966.507	0,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.571.861.830	4.451.993.173	97,38	119.868.657	2,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	690.375.000	687.927.000	99,65	2.448.000	0,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	114.715.369.726	114.259.719.876	99,60	455.649.850	0,40
TOTAL	223.846.829.500	216.033.584.809	96,51	7.813.244.691	3,49

Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.13, penyerapan anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah di TA 2021 adalah 96,51% dari pagu anggaran pada DPPA, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 7.813.244.691 (3,49%). Tingkat penyerapan tersebut lebih rendah 2,12% jika dibanding dengan tingkat penyerapan di tahun 2020, yang mana persentase SiLPA tahun 2020 sebesar 0,37%. Mempertimbangkan dari jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal terlihat bahwa silpa lebih besar disumbangkan dari sisa belanja operasi sebesar 6,97% atau setara 7,2M. Jika diperhatikan lebih rinci lagi bahwa sisa anggaran yang tidak terserap dari belanja operasi sebagian besar dari sisa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di lingkup Dinas BMPR (11%), kemudian sisa belanja barang jasa sebesar 4,9M yang mana berasal dari dua paket kegiatan jasa konsultansi dalam DPA Perubahan yang tidak dapat terealisasi akibat lambatnya pengesahan DPA Perubahan. Untuk realisasi fisik program dan kegiatan di tahun 2021 sebesar 98,65 akibat beberapa paket yang dianggarkan pada DPA Perubahan yang tidak bisa terselesaikan. Berbagai kebijakan telah dilakukan demi mencapai peningkatan kinerja penyerapan anggaran, tidak hanya semata melanjutkan strategi lelang dini paket-paket pekerjaan kontraktual, namun juga senantiasa pemanfaatan monev dinas mulai dari perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan kegiatan.